



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. SUROHADIKUSUMO NO 1 PEMALANG

2020



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050.4/56 /2020

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Nomor 050.3/24/2017 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016 -2021;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut peraturan tersebut pada huruf b, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;

27. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Nomor 050.11/75/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Nomor 050.3/24/2017 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

KESATU : Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program kegiatan dan anggaran pembangunan Tahun 2021.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terjadi perubahan atas kondisi pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Pemalang**
Pada tanggal 10 Agustus 2020



Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610821 198903 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 akhirnya dapat kami susun dengan segala keterbatasan yang ada.

Renja merupakan suatu proses yang berorientasi pada pada hasil yang dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi dan hambatan yang ada agar dapat mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD 2016 - 2021. Renja ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan, dengan memperhitungkan capaian yang telah dicapai sampai dengan tahun sebelumnya. Dalam penyusunan Renja ini masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan seluruh komponen organisasi dalam waktu satu tahun ke depan.



Drs.NUGROHO BUDI RAHARJO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610821 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG NOMOR/2020.....	ii	
DAFTAR ISI.....	iii	
DAFTAR TABEL.....	vi	
BAB I Pendahuluan		
1.1 Latar Belakang.....	I	
1.2 Landasan Hukum.....	I	
1.3 Sistematika penulisan.....	I - 5	
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I - 5	
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra OPD.....	II - 1	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	II - 14	
2.3 Evaluasi Pelaksanaan SPM.....	II - 32	
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	II - 35	
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal OPD.....	II - 38	
BAB III Tujuan, Sasaran ,Pogram dan Kegiatan		
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III - 10	
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD.....	III - 12	
3.3 Program dan Kegiatan OPD.....	III - 17	
BAB IV Penutup.....		I-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2016 Komunikasi dan Informatika.....	II -02
Tabel 2.2 Rekapitulasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD, Pencapaian Renstra OPD Sampai dengan Tahun 2019 Kabupaten Pematang.....	II -05
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang.....	II -27
Tabel 2.4 Hasil Evaluasi SPM bidang Komunikasi dan Informatika.....	II - 34
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Pematang.....	II - 40
Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Kabupaten Pematang.....	III- 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan system penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah – dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang – bertujuan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar perencanaan pembangunan tersebut dapat tersusun dengan baik dan tepat sasaran, maka perlu adanya pedoman Perencanaan Pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang merupakan dokumen yang harus disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, karena Dinas

Komunikasi dan Informatika adalah lembaga yang sebagian besar kegiatannya secara langsung berhubungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dari dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika inilah akan dapat dilihat seberapa besar perhatian Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
 25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
 26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
 27. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 050/..... Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
 28. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Nomor 050.11/75/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Nomor 050.3/24/2017 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;

1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : **Pendahuluan**, memuat perihal latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : **Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu**, memuat perihal evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan OPD, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III : **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan PD**, memuat perihal telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV : **Penutup**

1.4. Maksud dan Tujuan

Proses perencanaan membutuhkan kontinuitas untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penjabaran serta tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021. Sebagai suatu dokumen rencana kerja, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Adapun maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 antara lain adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD;
3. Menyediakan acuan resmi bagi OPD dalam menyusun Rencana Anggaran dan Kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
2. Untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangkamenengah;
3. Untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja OPD;
4. Sebagai acuan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pemalang kepada pemerintah dan LKPJ kepada DPRD;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Pemalang. Secara de facto Dinas Komunikasi dan Informatika ada sejak dilantikannya Para Pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada tanggal 3 Januari 2017. Dengan demikian Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 3 Januari 2017.

Tahun 2021, merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang periode 2016-2021. Sekaligus tahun terakhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

Pada Tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang melaksanakan 12 program dengan 58 kegiatan. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pemalang Tahun 2019, Anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 19.773.823.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.865.260.301 sehingga capaian realisasi adalah sebesar 95,41 %.

Sedangkan untuk Pendapatan, dari 1 rekening pendapatan dengan total target anggaran pendapatan sebesar Rp 50. 000.000,00 realisasi pendapatan adalah sebesar Rp. 50.732.000 sehingga capaian realisasi pendapatan adalah 101.5 %.

Evaluasi pelaksanaan Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut:

- I. Realisasi Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, realisasi 71.22%
 2. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi realisasi, 84.87%
 3. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, realisasi 70.02%
 4. Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat, realisasi 73.77%
- II. Realisasi Program Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat, realisasi 88.41%
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, realisasi 87.05%
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, realisasi 87.63%
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, realisasi 93.94%
 - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan, realisasi 96.78%
 - f. Penyediaan jasa kebersihan kantor, realisasi 94.65%
 - g. Penyediaan alat tulis kantor, realisasi 99.95%

- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, realisasi 98.27%
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, realisasi 99.52%
 - j. Penyediaan makanan dan minuman, realisasi 99.86%
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah, realisasi 99.59%
 - l. Penyediaan jasa keamanan, realisasi 99.47%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, realisasi 95.51%
 - b. Pengadaan mebeleur, realisasi 91.39%
 - c. Pengadaan komputer dan perlengkapannya, realisasi 96.48%
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, realisasi 98.17%
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, realisasi 99.51%
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, realisasi 95.81%
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur, realisasi 99.95%
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya, realisasi 94.93%
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik, realisasi 99.16%
 - j. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, realisasi 99.76%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, realisasi 96.08%
 - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, realisasi 89.84%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, realisasi 99.02%
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, realisasi 87.54%
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, realisasi 93,91%
 - d. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, realisasi 96,59%
5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- Penyusunan data base perencanaan SKPD, realisasi 98,89%
 - Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD, realisasi 99.91%
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
- a. Pengadaan alat studio dan komunikasi, realisasi 87.18%
 - b. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi, realisasi 93.21%
 - c. Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, realisasi 99.22%
 - d. Penyelenggaraan ekosistem smart city, realisasi 96.76%
 - e. Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagai pakai, realisasi 93.65%
 - f. Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah, realisasi 93.52%
 - g. Pengelolaan infrastruktur e-government data dan informasi terintegrasi, realisasi 98.07%
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- a. Asistensi/bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik, realisasi 93.84%
 - b. Asistensi/ bimbingan teknis bidang analisis data 88.78%

- c. Sosialisasi kehumasan bagi aparaturn pemerintah kabupaten pemalang, realisasi 93.85%
- 8. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
 - a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, realisasi 95.11%
 - b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, realisasi 95.03%
- 9 .Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah
 - a. Revitalisasi pendayagunaan media center daerah, realisasi 88.55%
 - b. Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center, realisasi 89.53%
 - c. Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik, realisasi 90.17%
- 10. Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika
 - a. Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll, realisasi 98,65%
 - b. Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD, realisasi 96.81%
 - c. Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial), realisasi 95.92%
 - d. Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televise, realisasi 91.61%
 - e. Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah, realisasi 94.33%
- 11. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
 - a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah, realisasi 99.33%
 - b. Pengelolaan data statistik daerah, realisasi 95.76%
- 12. Program Pengembangan Data / Informasi Persandian
 - a. Pengamanan komunikasi dan informasi, realisasi 98.56%
 - b. Penyelenggaraan keamanan Informasi 94,20 %

III. Realisasi Program Kegiatan yang melebihi target Kinerja hasil/ukuran yang direncanakan. Program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ukuran yang direncanakan tidak ada

IV. Faktor penyebab tidak tercapainya target terpenuhinya atau melebihi target

- a. Kurangnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia
- b. Kurang cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan

V. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Tidak tercapainya target capaian kinerja tentunya berimplikasi terhadap target capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Beberapa target kinerja yang tidak tercapai mengakibatkan beberapa target capaian program juga tidak tercapai.

VI. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mengambil langkah- langkah sebagai berikut:

- a. Lebih cermat dalam menyusun perencanaan
- b. Mengusulkan penambahan sumberdaya manusia

c. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia

2.2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistic. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

2.2. Fungsi

Didalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2.3. Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, bahwa kewenangan desentralisasi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah :

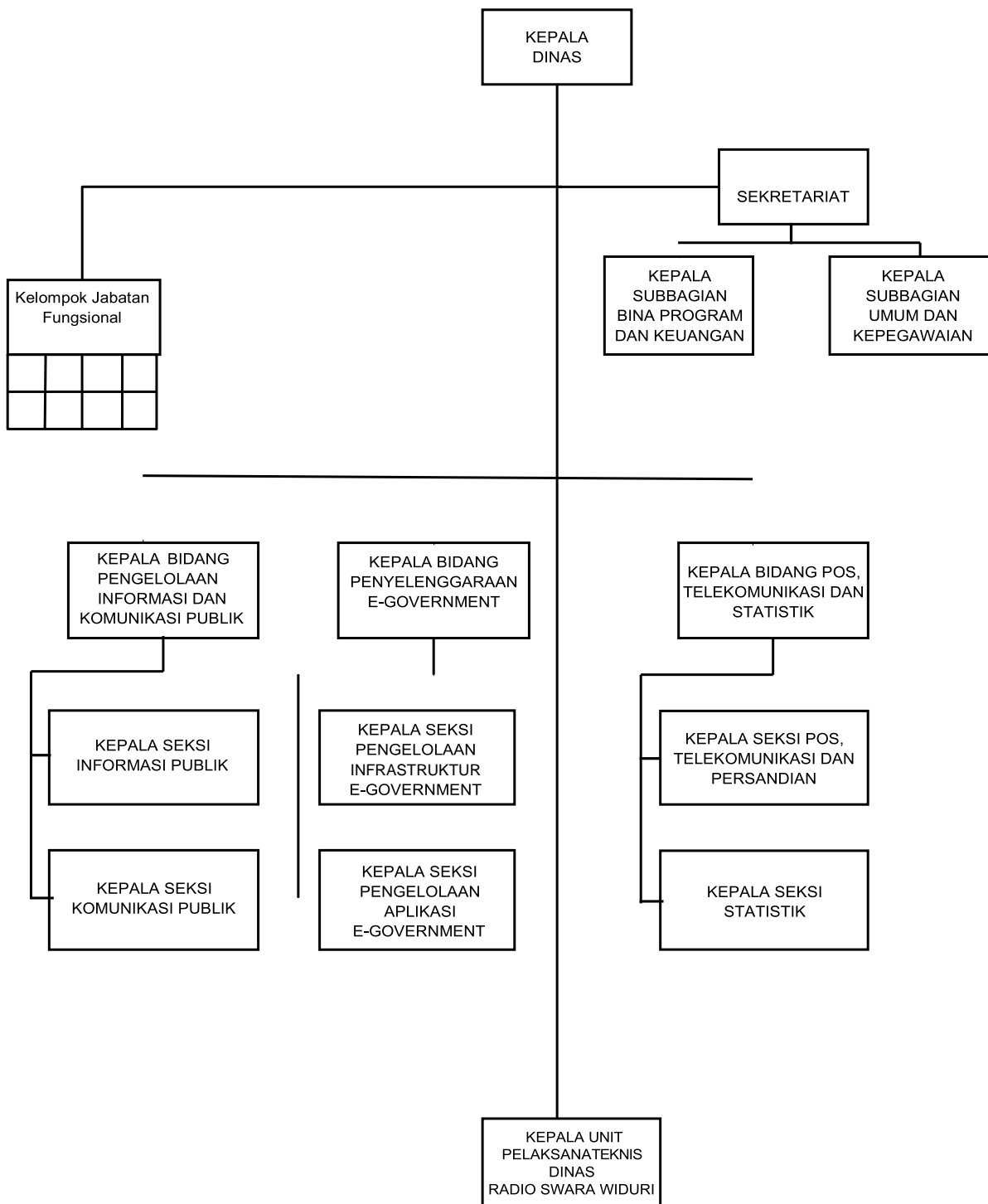
- a. Bidang Komunikasi dan informatika.
- b. Bidang Persandian.
- c. Bidang Statistik

2.4. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada Bagian Ketiga, menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat terdiri dari
 - a. Subbagian Bina Program dan Keuangan,
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari
 - a. Seksi Informasi Publik,
 - b. Seksi Komunikasi Publik,
4. Bidang Penyelenggaraan *E-Government* terdiri dari
 - a. Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government*,
 - b. Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government*,
5. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik terdiri dari
 - a. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian;
 - b. Seksi Statistik,
6. UPTD,
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN PEMALANG**



BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA);
2. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
6. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
7. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi,
8. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikankinerja;
10. merumuskan laporan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. mengkoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemenntah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaankegiatan,
3. menyusun rancangan kebijakan kesekretanatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaantugas,
4. menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
6. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) dalam rangka pengendalian internalkegiatan,
7. menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayananpublik,
8. mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaantugas,
9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretanatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
10. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan basik laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,dan
- 11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaankegiatan,
3. melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib admimstrasi,

4. mengelola data urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah guna pengendalian dan evaluasi pembangunandaerah,
5. melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan,
6. menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan panduan pembuatan laporan sebagai bahan pertanggungjawaban,
7. menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi,
8. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
9. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
11. menyusun bahan laporan urusan pemerintahan komunikasi dan
12. informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
13. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
2. merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
3. mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
4. mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
5. mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas, dan barang milik daerah secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
6. mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur kebijakan sesuai dengan target kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas,
7. mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi,
8. melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,

9. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenarkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Publik sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Informasi Publik dan Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4. menyusun konsep inovasi urusan pemerintah bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. menyusun laporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Informasi Publik

Kepala Seksi Informasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Informasi Publik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. menyusun konsep rancangan program dan kegiatan pada Seksi Informasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. menyusun rancangan kebijakan Seksi Informasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. menyusun konsep rancangan Rencana Induk Strategi Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
5. melaksanakan pengelolaan informasi publik serta hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah sesuai prosedur dan Ketentuan Peraturan

6. Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas saluran informasi publik serta hubungan masyarakat dengan Pemerintah Daerah,
7. melaksanakan kegiatan reproduksi informasi nasional sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keselarasan antara informasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
8. melaksanakan kegiatan pelayanan, fasilitasi dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik,
9. melaksanakan diseminasi informasi nasional sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebaran informasi,
10. melaksanakan pengelolaan pemutakhiran materi dan konten situs Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna pemutakhiran informasi publik,
11. melaksanakan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebarluasan informasi,
12. menyusun rancangan inovasi Seksi Informasi Publik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
13. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Informasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikankinerja,
14. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Informasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Seksi Komunikasi Publik

Kepala Seksi Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kinerja dan anggaran,
2. menyusun rancangan kebijakan Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. menyusun konsep rancangan Rencana Induk Strategi Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4. melaksanakan pengelolaan komunikasi publik serta hubungan masyarakat Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas saluran komunikasi publik serta hubungan masyarakat Pemerintah Daerah,
5. melaksanakan kegiatan audit komunikasi publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mengontrol komunikasi publik,
6. melaksanakan kegiatan kemitraan komunikasi dengan media sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kerjasama,
7. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya komunikasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kapasitas,
8. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah maupun masyarakat sesuai dengan prosedur teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya TIK,

9. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna efektifitas dan efisiensi komunikasi publik,
10. melaksanakan kegiatan pembinaan saluran komunikasi non pemerintah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pengelolaan saluran komunikasi non pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
11. melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan komunikasi sosial sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan komunikasi sosial,
12. menyusun rancangan inovasi Seksi Komunikasi Publik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
13. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
14. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

4. Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government*

Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mempunyai raian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* dan Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kinerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* dan Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* dan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4. Menyusun konsep inovasi urusan pemerintah Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government*

Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun rancangan kebijakan Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

3. Menyusun konsep rancangan Rencana Induk *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4. Melaksanakan pengelolaan *E-Government* Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola *E-Government* yang baik,
5. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur dasar Pusat Data (Data Center), *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informatika dan Komputer (TIK) Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan standar minimal penyelenggaraan *E-Government*,
6. Melaksanakan pengelolaan intranet Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan komunikasi data yang baik antar perangkat daerah,
7. Menyiapkan penyediaan layanan akses internet dan intranet sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebaran akses informasi,
8. Melaksanakan pengembangan infrastruktur teknologi dan komunikasi komputer (TIK) sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung pengembangan *E-Government*,
9. Melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyalarsan sumber daya teknologi dan komunikasi komputer (TIK) Pemerintah Daerah,
10. Menyusun rancangan inovasi Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government*

Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kinerja dan anggaran,
2. Menyusun rancangan kebijakan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaantugas,
3. Menyusun konsep rancangan Rencana Induk *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4. Melaksanakan pengelolaan nama domain dan sub domain situs Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyalarsan dengan ketentuan Pemerintah Pusat,
5. Melaksanakan pengelolaan interoperabilitas dan interkoneksi aplikasi dan database *E-Government* Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatkan *E-Government*,

6. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah Daerah yang terintegrasi,
7. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan suplemen sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan integrasi aplikasi,
8. Melaksanakan pengelolaan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan *SmartCity*,
9. Melaksanakan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola *E-Government* yang baik,
10. Melaksanakan pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik yang baik,
11. Melaksanakan pengelolaan aplikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara elektronik (e-LPPD) sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan pelaporan,
12. Menyusun rancangan inovasi di lingkungan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E- Government* berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E- Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikankinerja,
14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Aplikasi *E- Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

5. Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik

Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan bidang Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta bidang Statistik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep rancangan kebijakan bidang Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta bidang Statistik sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian serta Seksi Statistik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4. Menyusun konsep inovasi urusan pemerintah Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikankinerja,
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian

Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun rancangan kebijakan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyusun konsep rancangan Rencana Induk Pola Hubungan Komunikasi Sandi dan Pengamanan Informasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4. Melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap penyelenggaraan standardisasi dan perizinan pos dan telekomunikasi di daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna peningkatan pelayanan publik;
5. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan hubungan komunikasi sandi dan pengamanan informasi yang bersifat lokal sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna peningkatan pengetahuan dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pos, telekomunikasi dan persandian,
6. Melaksanakan pengelolaan keamanan informasi *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keamanan komunikasi data Pemerintah Daerah,
7. Melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah,
8. Mengoordinasikan penetapan, pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk pengamanan,
9. Melaksanakan kegiatan tata kelola dan perlindungan informasi berklasifikasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk pengamanan informasi,
10. Melaksanakan kegiatan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi, Materiil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar dan/atau bimbingan teknis persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk peningkatan kualitas kerja
 - i. Melaksanakan pengelolaan pusat data persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna ketersediaan informasi publik
 - ii. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan tingkat keamanan informasi secara internal pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjaga informasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah,
11. Melaksanakan pengelolaan materil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
12. Melaksanakan pelayanan satu pintu pengiriman dan penerimaan informasi berklasifikasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk efektivitas pelaksanaan kerja,
 - i. Mengelola kegiatan pemulihan data dan gangguan jaringan sistem informasi dengan menjaga integritas dan ketersediaan data,

13. Mengelola Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna perlindungan data,
14. Menyusun rancangan inovasi Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
16. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Seksi Statistik

Kepala Seksi Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun konsep rancangan program dan kegiatan pada Seksi Statistik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. Menyusun rancangan kebijakan Seksi Statistik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
3. Mengidentifikasi data, dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan survey pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk keterpaduan data dalam pelaksanaan survey,
4. Menyusun metode survey dan petunjuk teknis pelaksanaan survey sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh hasil survey yang akurat,
5. Melakukan konsultasi dan mengkoordinasikan persiapan penyelenggaraan survey pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan,
6. Melaksanakan kegiatan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh data statistik sektoral yang valid dan akurat,
7. Menyusun data hasil survei pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan untuk diolah menjadi laporan hasil survey,
8. Mempersiapkan bahan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei maupun kebijakan pada masa akan datang,
9. Mengidentifikasi konsep pengembangan metodologi survei, diseminasi statistik dan sistem informasi pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka meningkatkan mutu data statistik,
10. Menyusun rancangan inovasi Seksi Statistik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Statistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Statistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.3. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 31 Desember 2019 Personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Berdasarkan struktur:

Jumlah Struktural:

Eselon II/B	: 1 orang
Eselon III/A	: 1 orang
Eselon III/B	: 3 orang
Eselon IV/A	: 8 orang

Jumlah Pelaksana:

Pelaksana	: 30 orang
-----------	------------

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang, terdiri dari:

Pembina Tingkat I(IV/c)	: 1 orang
Pembina(IV/b)	: 1 orang
Pembina(IV/a)	: 2 orang
Penata Tingkat I(III/d)	: 7 orang
Penata(III/c)	: 4 orang
Penata Muda Tingkat I(III/b)	: 13 orang
Penata Muda(III/a)	: 6 orang
Pengatur Tingkat I(II/d)	: 2 orang
Pengatur(II/c)	: 7 orang
Pengatur Muda Tingkat I(II/b)	: 1 orang
Pengatur Muda (II/a)	: 1 orang

Berdasarkan pendidikan :

Sarjana Strata 2	: 3 orang
Sarjana Strata 1/Diploma IV	: 19 orang
Diploma III	: 2 orang
SLTA	: 20 orang

Sedangkan Tenaga/Pegawai kontrak (THL) pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Petugas fotografer	: 1 orang
2. Petugas Administrasi Kantor	: 4 orang
3. Petugas Penyiar Radio	: 3 orang
4. Marketing radio	: 3 orang
5. Penjaga server	: 6 orang
6. Programmer	: 4 orang

- 7. Penjaga gedung radio : 2 orang
- 8. Petugas Teknikal support multimedia : 4 orang
- 9. Petugas PPID : 2 orang
- 10. Analis Sistem : 2 orang
- 11. Petugas Kebersihan : 3 orang
- 12. Operator Komputer : 5 orang

Dari keseluruhan pegawai (PNS) apabila dilihat dari struktur kepangkatan dan tingkat pendidikan, maka SDM Dinas Komunikasi dan Informatika cukup representatif, dimana 70 % pegawai bergolongan III, dan 60 % berpendidikan SLTP –SLTA.

2.3.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik, kinerja aparat/petugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya didukung dengan adanya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya Studio Radio Swara Widuri, dan peralatan kamera dan tustel, peralatan video teleconference, Data center. Selain itu juga beberapa unit komputer sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran. Sedangkan prasarana yang ada berupa Gedung Kantor Pelayanan Administrasi, Gedung LPPL Swara Widuri, dan bangunan hotspot area.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas, Komunikasi dan Informatika didukung sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sumber Daya Sarana dan Prasana Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Jenis	Jumlah
1	Komputer PC	156 unit
2	Laptop	64 unit
3	LCD/proyektor attachment	17 unit
4	Telepon	5 unit
5	Televisi	16
6	AC unit	24
7	AC Split	12
8	Almari besi	5
9	Almari kaca	4
10	Almari kayu	4
11	Meja Kerja Eselon II	1
12	Meja Kerja pejabat lainnya	3
13	Meja Rapat	22
14	Meja Tulis	16
15	Meja telephone	1

16	Meja Resepsionis	3
17	Meja Komputer	55
18	Meja biro	57
19	Meja Operator	3
20	Meja tamu eselon II	1
21	Meja tamu eselon III	4

22	Kursi besi (metal)	13
23	Kursi kayu bamboo	11
24	Kursi Rapat	44
25	Kursi tangan	13
26	Kursi putar	10
27	Kursi biasa	74
28	Kursi lipat	10
29	Genset	2
30	Mesin bor lainnya	1
31	Avometer SU	2
32	Mesin Tik manual	7
33	Mesin fotokopi	1
34	Rak besi (metal)	4
35	Rak kayu	4
36	Filling Cabinet	27
37	Kendaraan Roda-4 (stasiun wagon)	10
38	Kendaraan Roda-2	16
39	Brankas	1
40	Papan Visual	1
41	Alat Penghancur kertas	2
42	Papan Tulis	5
43	White board	3
44	Mesin absensi	161
45	Overhead Proyektor	1
46	Alat kantor lainnya	9
47	Zice	2
48	Sofa	2
49	Jam mekanis	1
50	Lemari es	2
51	Kipas angin	4
52	Kompor gas	1
53	Amplifier	2
54	Loudspeaker	6
55	Sound Sistem	1
56	Wireless	4
57	Mikropone	4
58	Step Up/Down	2
59	Kamera video	7
60	Kamera Film	2
61	Tustel	9

62	Kaca hias	1
----	-----------	---

63	Dispenser	6
64	Mimbar / Podium	3
65	Handy cam	3
66	Alat rumah tangga lainnya	6
67	Alat pemadam portable	2
68	Local area network (LAN)	1
69	Internet	2
70	Card reader	94
71	Hard disk	7
72	Peralatan komputer mainframe lainnya	2
73	Printer	84
74	Scanner	3
75	Monitor	7
76	Peralatan personil computer lainnya	6
77	Server	13
78	Router	1
79	HUB	3
80	Peralatan jaringan lainnya	44
81	Meja kerja pegawai non structural	3
82	Compact disk player	3
83	Disk record player	5
84	Headphone	38
85	Microphone wireless/mic	2
86	Unintemuptible power supply (UPS)	2
87	Battery charger	4
88	Enconder/decorder	1
89	Audio cassette recorder	2
90	Digital audio tape recorder	2
91	Peralatan studio visual lain-lain	18
92	Peralatan studio video dan film lainnya	52
93	Camera elektronik	4
94	Video tape recorder stationer	1
95	Video mixer	1
96	Video switcher	1
97	Tripod camera	5
98	Lighting stand tripod	3
99	Film projector	2
100	Camera film	4
101	Lensa camera	6
102	Mixer PRC	1

103	Layar film	1
-----	------------	---

104	Lighting head body	4
105	Camera vertical	1
106	Handphone	17
107	Alat komunikasi lainnya	4
108	Megaphone	2
109	Handy talking	4
110	Unit transceiver stationary	2
111	Alat komunikasi radio HF/FM	24
112	Unit transceiver UHV portable	30
113	Alat komunikasi social lainnya	1
114	Unit pemancar VHF/FM stationary	1
115	Alat pemancar VHF/FM lainnya	1
116	Antena VHF/FM portable	1
117	Switcher/menara antenna lainnya	2
118	Bangunan gedung kantor permanen	3
119	Bangunan gedung kantor lainnya	5
120	Bangunan pagar keliling	1
121	Bangunan menara telekomunikasi lain-lain	12
122	Instalasi penangkal petir manual	1
123	Perangkat lunak system operasional	15
124	Camera	22
125	Soil Stabilizer	18
126	Meja Kayu	1
127	Lemari sorok	3
128	Meja Bunder	1
129	Mesin penghisab debu	1
130	Kitchen Set	1
131	Peralatan jaringan lainnya	28
132	Kursi hadap depan meja pimpinan	2
133	Lemari buku untuk perpustakaan	2
134	Alat keamanan lainnya	3
135	Countaintment Boxes (Single)	133
136	Sketsel	2
137	Meja Display	6
138	Meja Kursi Tamu	5
139	Rak Server	1
140	Tablet	1
141	CCTV	3
142	UPS	1

143	Mesin Antrian absen	1
144	Peripheral Komputer	1

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal karena tidak mengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Sehingga tidak diwajibkan memiliki SPM.

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian untuk Tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

Indikator :

1. Persentase perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo hasilnya 100%
2. Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi hasilnya 11%
3. Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintahan dan pemerintah daerah kabupaten hasilnya 0.4%
4. Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait e-government hasilnya 100%
5. Presentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo hasilnya 100%
6. Persandian tingkat keamanan informasi Pemerintah hasilnya 12.15%
7. Perda tentang konsultasi publik hasilnya terdapat perda tentang konsultasi publik yaitu perda Kabupaten Pemalang nomor 1 tahun 2011 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah
8. Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik hasilnya terdapat
 - Website resmi pemalangkab.go.id
 - Majalah "pemalang pusere jawa"
 - Tabloid "Pemalang hebat"
 - Lembaga penyiaran publik lokal "Radio swara widuri "
 - Layanan SMS center

- Mobil keliling pustika

- Website milik perangkat daerah se- kabupaten pemalang sejumlah 62 website

2.6. Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pemalang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Pencapaian target program prioritas daerah tahun 2019 yakni cakupan layanan TI bagi masyarakat dengan target jumlah titik hotspot yang terbangun 12 titik pada tahun 2019 telah tercapai 13 titik atau 108 %. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD yakni Tahun 2020, maka telah tercapai 92,8 %. Adapun hotspot area yang telah terbangun yakni, di RTH Patih Sampun, RTH Comal, Gandulan Cullinary Center, Alun-alun Moga, Randudongkal, Pulosari, Widuri, Watukumpul, Petarukan, Ulujami. Adapun yang hanya jaringannya saja Bodeh, Belik, dan Bantarbolang.

2.7. Evaluasi Target Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik

Target Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 sebesar Rp 18.805.023.000 Adapun realisasinya sebesar RP 17.918.758.543 . Anggaran tersebut untuk mendukung 10 program dan 57 kegiatan. Target anggaran Urusan Statistik sebesar RP 599.977.000 dengan realisasi sebesar Rp. 591.513.258 atau 98.59 %. Dan target Urusan Persandian sebesar Rp 368.823.000 dengan realisasi Rp 354.988.500 atau 96.25 %.

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauhmana tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang tahun 2019 masih cukup optimal dalam meningkatkan pelayanan public Pemerintah Kabupaten Pemalang. Namun demikian masih terdapat indicator kinerja yang belum dapat dipenuhi antara lain :

1. Integrasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yakni E-Planning, E-Budgeting dan E-Monev yang pada Tahun 2019 belum terealisasi.
2. Pemeringkatan/Indeks Keterbukaan Informasi Publik tingkat Jawa Tengah
3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
5. Pemenuhan Informasi Publik pada website pemalangkab.go.id dan sub domainnya
6. Tersedianya Data Center dengan NOC berstandar

7. Indeks Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI)

8. Ketersediaan Data Statistik terintegrasi

2. Permasalahan dan Hambatan:

Secara umum Dinas komunikasi dan informatika pada tahun 2019 menghadapi permasalahan antara lain:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Koneksi G2G

- Antar OPD belum terintegrasi baik dalam hal aplikasi data maupun jaringan interkoneksi;

2. Format data pada aplikasi di OPD belum sama sehingga sulit dilakukan interoperability;

3. Koneksi G To netizen/bisnis

- Fasilitas Wifi gratis di RTH atau area publik belum menyeluruh di masing-masingkecamatan;

- Kurangnya ketrampilan masyarakat/ netizen dalam melakukan pelayanan, komplain transaksi dan informasi secaraonline.

2. Urusan Persandian

- Kurangnya SDM PNS di bidang keamanan Siber dan Persandian;

- Kurangnya sarana ruangan yang standar keamanan informasi;

- Kurangnya kesadaran aparat pemerintah di bidang Keamanan Siber

- Terbatasnya fasilitas peralatan persandian.

3. Urusan Statistik

- Kurangnya SDM bidang Statistik yang memadai;

- Kurangnya Pemahaman OPD mengenai Statistik Sektoral.

3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian dan program nasional/internasional seperti NSPK, SPM,SDGs

Masih banyaknya persoalan dan adanya indicator kinerja yang belum dapat dipenuhi mengakibatkan beberapa capaian Visi dan Misi Bupati Pematang belum dapat tercapai. Demikian pula pada pencapaian IKK ada yang belum memenuhi target. Adapun terkait Indikator SDGs, ada beberapa indikator yang telah memenuhi target, antara lain:

1. Presentase SKPD telah menyusun peraturan layanan informasi public 66.6 %

2. Presentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi 71 %

3. Presentase Penduduk yang terlayani mobile broadband 93,5 %

4. Presentase penduduk yang menggunakan internet 50,5 %.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

- Tuntutan masyarakat terhadap kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informatika
- Maraknya informasi hoak

2. Peluang

- Industri Teknologi Komunikasi dan Informatika yang semakin maju dan berkembang, menjadikan peluang masyarakat untuk mengakses informasi semakin terbuka.

3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang untuk ditindaklanjuti

- Kualitas koneksi jaringan perlu untuk ditingkatkan
- Kualitas Konten dan kontinuitas update informasi pada website Pemerintah kabupaten Pemalang perlu untuk ditingkatkan.

4. Integrasi aplikasi pemerintahan harus segera dilaksanakan

- Kualitas pelayanan informasi public harus ditingkatkan.

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian (%)			Proyeksi (%)			Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :													
2	a.Media Massa seperti majalah, radio, dan televisi;			1	1	1	1	0	0	1		1	1	
3	b.Media baru seperti website (media onilne);			4	4	4	4	4	4	4		4	4	
4	c. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat;			1	1	1	1	0	0	1		1	1	
5	d.Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	e.Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho;			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
7	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Keompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan			14	14	15	14	14	15	15	9	14	14	
8	Banyaknya jaringan komunikasi SKPD			40	40	48	40	40	48	48	48	48	48	
9	Jumlah Penyiaran Radio/Pengawasan Isi Siaran Radio			10	11	11	11	11	11	11	11	11	12	
10	Persentase SKPD telah memiliki Website			20	40	84	72	84	100	84	66	100	100	
11	Tersedianya Data Center			20	40	80	80	100	40	80	40	60	80	
12	Jumlah Dokumen Kabupaten Pemalang dalam angka			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

13	Jumlah dokumen Kecamatan dalam angka			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Jumlah Dokumen PDRB Kabupaten Pemalang			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Jumlah Dokumen PDRB Kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Jumlah dokumen Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten Pemalang			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Jumlah dokumen NTP Kabupaten Pemalang			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentas perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo			70	80	90	100	80	90	100	100	100	
20	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			Na	Na	10	20	Na	Na	10	11	20	
21	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten			Na	Na	10	20	Na	Na	Na	0,4	2	
22	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government			Na	Na	100	100	Na	Na	100	100	100	
23	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas kominfo			10	10	10	10	10	10	10	10	10	
24	Tingkat keamanan informasi Pemerintah			Na	Na	10	20	na	Na	10	12,5	15	

1.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Isu dan Masalah Mendesak

Isu dan permasalahan mendesak saat ini berkenaan dengan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di wilayah Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut:

- Kurangnya kualitas koneksi jaringan
- Kurangnya kualitas konten website Pemerintah daerah
- Belum semua sistem aplikasi pemerintah daerah terintegrasi
- Kurangnya kualitas penyelenggaraan KIP

Adapun permasalahan terkait Urusan statistik antara lain:

- Masih adanya keterlambatan penyediaan data statistik yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan.

Permasalahan Urusan Persandian yakni:

- Belum semua OPD menggunakan persandian dalam surat menyurat.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang (RPJMD 2016 - 2021) yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam menyusun Rancangan Renja PD juga mendasarkan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2016 – 2021. Hal tersebut sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD 2021 dimana besarnya anggaran yang direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan kebutuhan dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selaku lembaga yang melayani komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten diperoleh melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan dan Kabupaten. Hasil Musrenbang Kecamatan berupa Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan Non Fisik disampaikan oleh masing-masing delegasi kecamatan pada saat Forum SKPD/Musrenbang Kabupaten yang diselenggarakan pada tanggal 13 April 2020. Tidak Terdapat usulan dari delegasi kecamatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berikut adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dengan analisis kebutuhan:

**Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten Pemalang TAHUN 2021**

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi / Sub Unit	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu Ranwal Renja (Rp)	Pagu Rancangan Renja(Rp)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dinas Komunikasi, dan Informatika				19,996,220,000	20,164,945,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10			Komunikasi dan Informatika				19,006,220,000	19,174,945,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.00 Bulan	798,800,000	791,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Persentase tersedianya jasa surat menyurat	3500.00 Surat	20,000,000	20,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Prosentase tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	12.00 Buah	208,000,000	208,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	35.00 Jenis	27,600,000	27,600,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7.00 unit	24,000,000	24,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

				kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	9.00 unit			
2	10	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	dokumen data yang tersedia	300.00 dokumen	60,000,000	80,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah tenaga kebersihan dan alat - alat kebersihan yang tersedia	8.00 bulan	19,200,000	19,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor yang tersedia	12.00 Bulan	50,000,000	50,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy yang dibutuhkan dinas	6.00 Jenis	36,000,000	36,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	presentase tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor.	8.00 Jenis	24,000,000	24,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1.00 unit 4.00 unit 1.00 unit 1.00 pak	27,600,000	0	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12.00 Bulan	13,200,000	13,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	17	Penyediaan makanan dan	Dinas Komunikasi, dan	Jumlah kebutuhan makanan dan	9.00 bulan	79,200,000	79,200,000	Dinas Komunikasi, dan

				minuman	Informatika	minuman yang dibutuhkan					Informatika
2	10	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah		204,000,000	204,000,000		Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jasa keamanan kantor yang tersedia	3.00 Jenis	6,000,000	6,000,000		Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam	12.00 Bulan	1,735,800,000	1,749,125,000	0	Dinas Komunikasi, dan Informatika

						kondisi baik				
2	10	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang terpenuhi	7.00 unit	850,000,000	850,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang Tersedia	1.00 paket	25,000,000	25,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	10	Pengadaan mebeleur	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terpenuhinya kebutuhan Meubeler	1.00 Jenis	30,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah komputer dan perlengkapan yang Tersedia	1.00 unit	25,800,000	25,800,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	12	Pengadaan alat-alat elektronik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah alat-alat elektronik yang diadakan	1.00 paket	310,000,000	310,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah komputer dan perlengkapan yang Tersedia	1.00 unit	90,000,000	90,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.00 unit	60,000,000	60,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor	12.00 Bulan	60,000,000	60,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah Mebeleur yang terpelihara	2.00 Jenis	40,000,000	40,000,000	Dinas Komunikasi,

										dan Informatika
2	10	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang Dipelihara	10.00 unit	30,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	31	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat Elektronik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah alat-alat elektronik yang Terpelihara	6.00 unit	25,000,000	25,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	2	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.00 paket	190,000,000	203,325,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase meningkatnya kapasitas Sumber daya aparatur	80.00 %	230,400,000	230,400,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	44.00 Orang	48,000,000	48,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah aparatur pemerintah yang mengikutibintek	30.00 Orang	182,400,000	182,400,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	10.00 dokumen	70,800,000	100,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah terselesaikannya laporan capaian kinerja	4.00 dokumen	18,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Jumlah laporan keuangan bulanan yang tersusun tepat waktu	1.00 dokumen	14,400,000	15,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Komunikasi, dan Informatika			14,400,000	15,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	6	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan	4.00 dokumen	24,000,000	40,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		- Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	4.00 dokumen	82,200,000	216,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	9	1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dokumen database perencanaan SKPD yang tersusun	2.00 dokumen	58,200,000	170,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	2.00 dokumen	24,000,000	46,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		tersedianya data center cakupan layanan BTS jumlah radio siaran/pengawasan isi siaran radio	100.00 % 95.00 % 12.00 perusahaan	10,993,070,000	10,993,070,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	5	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya peralatan studio dan komunikasi	3.00 unit	84,000,000	84,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	6	Pengkajian dan pengembangan sistem Informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya data base sistem informasi	4.00 dokumen	895,200,000	895,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	8	Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi	3.00 paket	66,510,000	66,510,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	9	Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan Informatika	4.00 paket	800,000,000	800,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	10	Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan Informatika	1.00 paket	1,182,000,000	1,182,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	15	11	Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara Elektronik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya layanan pengadaan	4.00 kegiatan	360,000,000	360,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	12	Penyelenggaraan ekosistem Smart City	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya aplikasi dan infrastruktur untuk pemerintahan maupun publik guna mewujudkan smart city	3.00 lokasi kegiatan	1,560,000,000	1,560,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	15	13	Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagi pakai	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terkoneksinya aplikasi- aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan aplikasi berbagi pakai	7.00 aplikasi	878,400,000	878,400,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	14	Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terwujudnya tata kelola domain dan sub domain pemerintah daerah yang aman dan handal - Pelatihan interoperabilitas dan interkoneksi	1.00 kegiatan	986,160,000	986,160,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	15	Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terintegrasinya data dan infrastruktur komunikasi	20.00 OPD	4,180,800,000	4,180,800,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	16		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		presentase SKPD yang telah memiliki website	80.00 % 80.00 %	165,900,000	165,900,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	16	4	Asistensi/bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	fasilitasi peningkatan aparatur pemerintah daerah dalam bidang jurnalistik	100.00 Orang	51,900,000	51,900,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	16	5	Asistensi/bimbingan teknis bidang analisis data	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah pegawai ASN yang mengikuti bintek/pelatihan jumlah aparatur pemerintah yang mengikutibintek	50.00 Orang 50.00 Orang	30,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	16	11	Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten Pemalang	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	100.00 Orang	84,000,000	84,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	17		Program kerjasama informasi dengan mas media		terlaksananya desiminasi informasi		1,192,152,000	1,192,152,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	17	1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media		761,196,000	761,196,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	17	2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah tersebarnya informasi pemerintahan daerah melalui penerbitan majalah, tabloid, koran dan terlaksananya pelayanan multimedia	3000.00 eksemplar	346,956,000	346,956,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	17	3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi Masyarakat	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terlaksananya desiminasi informasi	4.00 kali	84,000,000	84,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	18		Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah		Cakupan IKM yang dibina	14.00 kelompok	304,134,000	304,134,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	18	5	Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui media center daerah	625.00 dokumen	127,614,000	127,614,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	18	10	Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Presentase pengaduan ditindaklanjuti/ditangani	12.00 Bulan	116,520,000	116,520,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	18	11	Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah Rapat Koordinasi Penataan Ruang yang	1.00 kegiatan	60,000,000	60,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

			Public		dilaksanakan				
2	10	19	Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika		presentase SKPD yang telah memiliki website	80.00 %	3,432,964,000	3,432,964,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
				presentase SKPD yang telah memiliki website	80.00 %				
				presentase SKPD yang telah memiliki website	80.00 %				

2	10	19	5	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet dan baleho		366,624,000	366,624,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	7	Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terdokumentasi nya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	360.00 kegiatan	795,900,000	795,900,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	8	Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial)	Dinas Komunikasi, dan Informatika Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat		1,234,680,000	1,234,680,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	9	Komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televise	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terfasilitasinya komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televise terfasilitasinya komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televise	5.00 kegiatan 24.00 kegiatan	419,760,000	419,760,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	12	Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	penyusunan data informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sangketa informasi penyediaan informasi public	2.00 kegiatan	216,000,000	216,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

						penyusunan data informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sangketa informasi penyediaan informasi public				
2	10	19	14	Pengelolaan program radio dan televisi daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terlaksananya program radio dan televisi daerah	120.00 kegiatan	400,000,000	400,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

				untuk masyarakat		untuk masyarakat				
2	14			Statistik				619,412,400	619,412,400	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	14	15		Program pengembangan data/informasi/statistik Daerah		dokumen data yang tersedia	1.00 dokumen	619,412,400	619,412,400	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	14	15	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Berkembangnya data/informasi/statistik Daerah	12.00 Bulan	529,412,400	529,412,400	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	14	15	5	Pengelolaan Data Statistik Daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dok kab pemalang dalam angka, jumlah dok kec dalam angka, jumlah dok PDRB kec, jumlah dok indeks harga konsumen dan laju inflasi kab pemalang, jumlah dok indikator penting pembangunan kab Pemalang	12.00 Bulan	90,000,000	90,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	15			Persandian				370,587,600	370,587,600	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	15	15		Program pengembangan data/informasi persandian		presentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	100.00 %	370,587,600	370,587,600	Dinas Komunikasi, dan Informatika

						presentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD presentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

100.00 %

2	15	15	1	Pengamanan komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi		148,200,000	148,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	15	15	2	Penyelenggaraan kemananan informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terselenggaranya pelayanan publik yang aman handal, percaya dan bertanggungjawab		222,387,600	222,387,600	Dinas Komunikasi, dan Informatika

Berdasarkan hasil review pada tabel 3 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah kegiatan yang telah tercantum pada Rancangan Awal RKPD adalah sebanyak 61 kegiatan. Berdasarkan evaluasi, masukan dan saran melalui musrenbang jumlah kegiatan pada rancangan akhir RKPD tetap. Semua kegiatan telah mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Dalam hal perencanaan anggaran, masih dapat memenuhi sesuai dengan kebutuhan.

Prioritas pendanaan lebih diberikan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat fasilitasi ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target IKK dan NSPK, serta publikasi mengenai pencegahan dan dampak balita stunting dan pandemic covid.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Visi Misi Pembangunan Nasional 2020 – 2024

Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong", yang diwujudkan melalui pelaksanaan 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong, dirumuskan tujuh agenda prioritas yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Perwujudan visi pembangunan Indonesia 2020-2024 melalui ketujuh misi sebagaimana tersebut di atas Bersama lima arahan Presiden, dilaksanakan dalam upaya mencapai Visi Indonesia 2045. Kelima arahan Presiden tersebut adalah:

1. Pembangunan sumber daya manusia.
2. Pembangunan infrastruktur.
3. Penyederhanaan regulasi.
4. Penyederhanaan birokrasi

5. Transformasi ekonomi

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024 sampai dengan RENJA ini disusun masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, Renstra yang ditelaah di sini adalah hal-hal dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

A. Arus Utama RPJMN 2020 yang terkait dengan Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian

1. Arus utama yang kedua : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Indikator:

Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE instansional

2. Arus Utama yang ke enam : Transformasi Digital

Indikator:

- 1) Meningkatnya NRI (Network Readiness Index) untuk mengukur bagaimana teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dapat memberikan dampak terhadap suatu negara.
- 2) Memperkuat IDI (ICT Development Index) untuk melihat bagaimana pengembangan TIK suatu negara dari sisi infrastrukturnya

B. Agenda Nasional yang terkait Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

AGENDA 1: MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan data statistik ekonomi kreatif2. Ketersediaan data statistik pariwisata3. Ketersediaan data statistik e-commerce4. Perbaikan data produksi pangan
	Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah untuk Pemerataan Pembangunan Antarwilayah	Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)
	Reformasi Pelayanan Publik	Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat

		dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk Mall Pelayanan Publik.
		Membangun Hub Inovasi pelayanan publik sebagai pusat pembelajaran, jaringan informasi, dan bimbingan inovasi pelayanan publik
		Memantapkan pelayanan publik berbasis online yang transparan dan memberikan kepastian, di antaranya melalui Online Single Submission

AGENDA 6: MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI & PELAYANAN DASAR

KERANGKA	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
PP 3. Infrastruktur Untuk Mendukung perkotaan		
KP 3 : Infrastruktur dan ekosistem TIK Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penetrasi jaringan tetap pitalebar 2. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan dan mengimplementasi kota cerdas 	Pengembangan TIK Perkotaan
PP 5. Transformasi Digital		
KP 1. Penuntasan infrastruktur TIK	Meratanya akses layanan telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Infrastruktur pitalebar Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital (Major Project) 2. Pengembangan Infrastruktur penyiaran 3. Pengembangan infrastruktur TIK Pemerintahan
KP 2. Pemanfaatan infrastruktur TIK	Optimalisasi pemanfaatan TIK untuk sektor strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan TIK layanan pemerintah 2. Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha

KP 3. Fasilitas pendukung transformasi digital	Meningkatnya daya saing industri dan SDM TIK dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi • Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital (Major Project) 2. Pengembangan literasi dan keahlian TIK 3. Pengembangan dan fasilitasi industri TIK
--	---	--

AGENDA 7:MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR
Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Tata Kelola Komunikasi dan Informasi Publik 2. Peningkatan kualitas konten 3. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informati 4. Meningkatkan akses komunikasi publik; 5. Meningkatkan literasi TIK masyarakat; 6. Meningkatkan kualitas isi atau program
Reformasi Kelembagaan Birokras	Terwujudnya kelembagaan yang efektif berbasis prioritas pembangunan	Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Skor Global Cyber Security Index (0,838)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatnya ketahanan masyarakat terhadap serangan siber 2. Menguatnya tata kelola pemangku kepentingan terkait siber

Upaya mewujudkan visi Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong, dilaksanakan melalui tahapan perencanaan pembangunan tahunan. Untuk 2021, upaya tersebut dilaksanakan melalui arah kebijakan “Meningkatkan industri, pariwisata dan investasi di berbagai wilayah didukung oleh SDM, dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas”. Arah kebijakan tersebut salah satunya diimplementasikan melalui pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada RPJMN 2020-2024. Beberapa major project yang mendukung langsung tema pembangunan nasional 2021 adalah:

- a. Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, LombokMandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru,

- Bangka Belitung, dan Morotai;
- b. Sembilan Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter;
- c. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; dan
- e. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

3.2 Telaahan Terhadap Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Visi Jawa Tengah 2018-2023

“ Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Misi Pembangunan Jawa Tengah 2018-2023

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahankabupaten/kota.
3. memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan danpengangguran.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 ditujukan pada “Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing SDM”, dengan arah kebijakan meliputi:

- a. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana;
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

3.3. Telaahan Terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pemalang

a. Visi

Visi Kabupaten Pemalang tahun 2016 – 2020 adalah :

“ Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera. ”

Penjelasan Visi :

Dalam visi tersebut di atas terdapat lima gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pemalang, yaitu:

1. **Pemalang Hebat**, Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat merupakan *ultimate goal* yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. **Pemalang Hebat** juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para *stakeholder* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.
2. **Berdaulat** diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.
3. **Berjati diri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.
4. **Mandiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.
5. **Sejahtera** diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang. Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung keseluruhan Misi Kabupaten Pemalang.

Pencapaian Visi "Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera", ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah, mufakat dan gotongroyong
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat,

keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak

3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar yang merata serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan daya saing daerah
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum, kemudahan investasi dan daya saing daerah
7. Menumbuhkan kembali Budaya Asli Daerah Kabupaten Pemalang sebagai landasan pembentukan jati diri Pemalang untuk memperkokoh kepribadian bangsa

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Pemalang 2016-2021, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan **misi 1 (pertama)** Kabupaten Pemalang yakni "*Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong*", dan **misi yang ke 6** (Enam) yaitu *Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan supermasi hokum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sebagaimana dimaksud dalam undangundang tersebut merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk menjamin kesinambungan kebijakan dan program pemerintah daerah dengan Perangkat Daerah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan setiap tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Pengembangan sumber daya manusia berkualitas menuju Pemalang yang sejahtera merupakan tema pembangunan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi 2 yaitu "Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak". Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk menempuh pendidikan yang berkualitas melalui pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Pelayanan kesehatan yang prima dan merata melalui pembangunan berkelanjutan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan kualitas SDM kesehatan.
3. Peningkatan kualitas hidup serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara komprehensif.
4. Peningkatkan pengendalian penduduk melalui pelayanan keluarga berencana dan

keluarga sejahtera

Pada pertengahan bulan Maret 2020 pandemic Covid-19 telah memasuki Indonesia. Terjadinya Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan kebijakan baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Kabupaten Pematang Jaya. Pandemi ini diperkirakan memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian nasional maupun daerah. Oleh karena itu kebijakan pemerintah Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2021 juga mengalami perubahan. Dengan prioritas pada **Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas.**

Adapun arah kebijakan tahun 2021 antara lain:

1. Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19
 - a. Pemulihan ekonomi
 - b. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
4. Penguatan ketahanan bencana

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika dengan segala isu-isu serta permasalahannya yang telah dipaparkan dalam BAB II, maka Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan dan sasaran agar visi dan misi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun dapat tercapai.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel.3.1

Tujuan dan sasaran Program Prioritas Daerah Urusan Komunikasi dan
Informatika

Tujuan	Sasaran	Indikasi sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas jaringan telekomunikasi dan Informatika guna menunjang publik	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Titik Hot spot	Na	3	6	9	12	14	14

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran dan Indikator beserta program Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Target Tahun 2021	Nama Program	Indikator program	Target Kinerja program Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LKJIP	Nilai	B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kualitas Aparatur Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik Prosentase Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Prosentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 Bulan 100% 100% 100%

					keuangan		100%
					Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	- Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang	Persen	100%	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Prosentase SKPD yang telah memiliki website	100%

yang prima dan perbaikan citra publik		<p>Ditindak lanjuti tepat waktu</p> <p>Tingkat pemenuhan informasi publik pada website Pemalangkab.go.i d</p> <p>Pemeringkatan keterbukaan Infomasi Publik</p>	<p>Persen</p> <p>Peringkat</p>	<p>100%</p> <p>10</p>			
	Memperkuat kualitas Aparat Komunikasi Informatika.	- Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	Persen	100%	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika	Prosentase SDM yang meningkat kompetensinya	100%
	<p>Membangun Citra Positif</p> <p>Pemerintah Kabupaten Pemalang di</p> <p>Mata Publik</p>	- Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang	Persen	95:5	Program kerjasama Informasi dengan mass media	<p>Prosentase informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipublikasikan melalui media massa</p> <p>Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah , radio dan televise</p> <p>Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan</p>	<p>100%</p> <p>4 kali</p> <p>4 kali</p>

						pendistribusian informasi nasional melalui baru (online)	
						Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional	1 kali
						Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan	3 kali

						pendistribusian informasional melalui media interpersonal - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang	4 4
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap informasi public	- Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasimedia	Kelompok	14	Program Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah	Cakupan IKM yang dibina di Pematang	14 kecamatan
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (IndeksPEGI)	Persen Nilai	100 3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	100%

		Pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi	persen	80%	Program Pengembangan Persandian/Informasi Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi melalui sarana sandi dan telekomunikasi Yang tersampaikan kepada pihak terkait	100%
--	--	--	--------	-----	--	---	------

	<p>Terintegrasinya data (interoperabilitas sistem informasi) antar seluruh SKPD/OPD</p>	<p>- Prosentase data statistic antar SKPD/OPD yang terintegrasi</p>	<p>Persen</p>	<p>80</p>	<p>Program Pengembangan Data/Statistik/Informasi daerah</p>	<p>Presentase ketersediaan dokumen statistik</p> <p>Jumlah dokumen Kabupaten dalam angka</p> <p>Jumlah dokumen kecamatan dalam angka</p> <p>Jumlah dokumen PDRBkecamatan</p> <p>Jumlah dokumen Indeks Harga konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten pemalang</p> <p>Jumlah dokumen NTP Kabupaten pemalang</p> <p>Jumlah dokumen indikator penting pembangunan daerah kabupaten pemalang</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
--	---	---	---------------	-----------	---	---	---

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kabupaten Pemalang yang menjadi tugas dan fungsi Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 5 (lima) tahun kedepan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Berdasarkan analisis dari pembobotan dengan menggunakan metode profesional judgement, maka terdapat 5 (lima) strategi pilihan yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.
2. Menerapkan tata kelola E Government dan Pelayanan Informasi Publik.
3. Mengintegrasikan data TIK dan data pelayanan publik.
4. Membangun infrastruktur jaringan TIK dan komunikasi publik.
5. Pemberdayaan Masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendasarkan pada tujuan RPJMD adalah sebagai berikut:

Tujuan 1:

Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah

Sasaran :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

Strategi:

Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.

Kebijakan:

- Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturanperundang-undangan

Tujuan 2 :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik

Sasaran 1: Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.

Strategi:

Pemanfaatan TIK dalam kegiatan pelayanan publik secara transparan, cepat dan handal.

Kebijakan:

1. Restrukturisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di setiap OPD.
2. Menyusun SOP Standar Layanan Informasi Publik.
3. Menyediakan sarana informasi publik.
4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan informasi publik.
5. Menyediakan konten layanan informasi publik.
6. Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
7. Pengembangan layanan informasi.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Aparatur di bidang Komunikasi Informatika

Strategi:

Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan:

Meningkatkan keahlian dan keterampilan Aparatur Sipil Negara di setiap SKPD/OPD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima

Sasaran 3: Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya di Mata Publik

Strategi : Optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan media informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kebijakan:

1. Meningkatkan peran PPID sebagai juru bicara lembaga
2. Meningkatkan peran PPID dalam menghimpun dan mengeloladata
3. Membekali sarana dan prasarana teknologi informasi bagi PPID untuk kebutuhan layanan informasipublik
4. Meningkatkan kerjasama informasi dengan media massa
5. Meningkatkan kualitas media milik pemerintah daerah
6. Penguatan literasi media untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya

Sasaran 4 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi

Strategi:

Mengoptimalkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kebijakan:

1. Menyediakan data yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat
2. Pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan 2 :

Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik

Sasaran 1 :

Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Strategi: Mengembangkan sarana dan prasarana TIK untuk mewujudkan data terpadu.

Kebijakan:

1. Membangun data center dan NOC berstandar.
2. Pengembangan jaringan FO
3. Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkatkeras
4. Menyusun standar basisdata
5. Menyusun mekanisme interoperabilitas antardata.
6. Menyediakan server basis data dan aplikasi
7. Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile
8. Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas.

Sasaran2: Terintegrasinya data antar SKPD/OPD

Strategi: Mengintegrasikan data dan aplikasi pemerintahan untuk mempercepat pertukaran data

Kebijakan:

Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dan penguatan statistic sektoral

3.4. Program dan Kegiatan SKPD

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2016 - 2021 yang bereferensi pada RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 -2021. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan OPD yang menjadi bidang tugas.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat serta tolok ukur pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021, Indikator SDGs, dan NSPK.

Dari prioritas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan sasaran seperti tersebut di atas. Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut, diperlukan dukungan oleh segenap komponen organisasi yang terintegrasi dalam rencana program dan kegiatan terpadu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 menggunakan nomenklatur yang sesuai dengan Pemendagri tersebut.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

4. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

5. Penyediaan jasa administrasikeuangan
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan alat tuliskantor
8. h. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Penyediaan bahan logistic kantor
12. Penyediaan peralatan rumahtangga
13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
14. Penyediaan makanan dan minuman
15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
16. Penyediaan jasa keamanan

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan:

1. Pengadaan kendaraandinas/operasional
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
5. Pengadaan alat-alat elektronik
6. Pengadaan mebeleur
7. Pengadaan peralatan gedung kantor
8. Pengadaan lemari besi dan filling kabinet
9. Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
10. Pemeliharaan rutin kendaraandinas/operasional
11. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
13. Rehab sedang/berat gedung kantor
14. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya
15. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

kegiatan:

1. Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan:

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

1. Penyusunan data base perencanaan SKPD
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

kegiatan :

1. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi;
2. Pemeliharaan Alat Studio danKomunikasi
3. Pengkajian dan Pengembangan sistem Komunikasi danInformasi;
4. Penyelenggaraan ekosistem smartcity
5. Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagaipakai
6. Pengelolaan nama domain dan sub domaindaerah
7. Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi
8. Pembangunan sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika
9. Pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika

7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

kegiatan :

1. Asistensi/bimbingan Teknis bidang Teknis Jurnalistik
2. Asistensi/bimbingan Teknis bidang analisis data
3. Sosialisasi Kehumasan bagi aparaturn Pemerintah Kabupaten Pemalang

8. Program Kerja Sama Informasi dengan Masa Media

kegiatan :

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat.

9. Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah

kegiatan :

1. Revitalisasi pendayagunaan media center daerah
2. Penguatan Komunikasi Publik melalui website dan media center
3. Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik

10. Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika

kegiatan :

1. Pengelolaan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho, dll
3. Dokumentasi/publikasi program/kegiatan SKPD
4. Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (advertorial)
5. Komunikasi Publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi
6. Pengelolaan program radio dan televise daerah untuk masyarakat

11. Program Pengembangan Data/Statistik daerah

1. Penyusunan dan pengumpulan data Statistik Daerah
2. Pengelolaan data statistic daerah

12. Program Pengembangan Persandian/informasi daerah

1. Pengamanan komunikasi dan informasi
2. Penyelenggaraan keamanan informasi

**REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021**

**KABUPATEN : PEMALANG
PERANGKAT DAERAH : Dinas Komunikasi, dan
Informatika**

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi / Sub Unit	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dinas Komunikasi, dan Informatika				21.598.587.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10			Komunikasi dan Informatika				20.223.587.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.00 bulan	1.524.400.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Komunikasi, dan Informatika	tersedianya jasa surat menyurat	5000.00 surat	70.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.00 bulan	314.400.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	8.00 Jenis	150.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	1 0	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	23 unit	50.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	tersedianya jasa administrasi keuangan	3000 dokumen	60.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya jasa kebersihan kantor	4 orang	60.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1	1 0	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor yang tersedia	35 Jenis	50.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1	1 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	5 Jenis	40.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1	1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	3. Jenis	290.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1	1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Terpenuhinya jumlah buku dan bacaan yang tersedia	60 buku	20.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1	1 7	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah makanan dan minuman kantor yang terpenuhi	1080.ora ng/ hari	100.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1	1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dapat dihadiri	20.kali	200.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	1 0	1	1 9	Penyediaan Jasa Keamanan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jasa keamanan kantor yang tersedia	2.Jenis	120.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00 %	3.140.887.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah Kendaraan dinas untuk operasional yang terpenuhi	5.unit	710.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	4. Jenis	40.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	2	1 0	Pengadaan mebeleur	Dinas Komunikasi, dan Informatika	-Jumlah mebeleur yang terpenuhi	3 Jenis	420.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	2	1 1	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah komputer dan perlengkapannya terpenuhi	2. Jenis	100.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	2	1 2	Pengadaan alat- alat elektronik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	-Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	5.Jenis	700.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	2	2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3. Jenis	300.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	2	2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23 unit	150.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	1 0	2	2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	-Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 Jenis	200.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	2	2 9	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4 Jenis	25.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	2	3 0	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan selama 12 bulan	20 unit	25.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	2	3 1	Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah alat-alat elektronik yang terpelihara	4. Jenis	20.887.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	2	4 2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5 unit	450.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase meningkatnya kapasitas Sumber daya aparatur	100 %	700.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	60 orang	350.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah Bimtek yang diikuti dan pelatihan	60 orang	350.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Prosentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.%	128.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	1 0	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	4.dokumen	30.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1.dokumen	5.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Komunikasi, dan Informatika	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	3.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	6	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terlaksananya monev dan pelaporan	12.bulan	90.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		Prosentase Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	100 %	225.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	9	1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dokumen database perencanaan SKPD yang tersusun	2 dokumen	205.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	4.dokumen	20.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 5		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Jumlah sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	100.%	9.000.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 5	5	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya peralatan studio dan komunikasi	3.Jenis	150.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	1 0	1 5	6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya data base sistem informasi	1.kegiatan	400.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 5	8	Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi	12.bulan	50.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 5	9	Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	3.kegiatan	500.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 5	1 0	Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Kondisi software dan sistem informasi yang terpelihara	2.Jenis	500.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 5	1 2	Penyelenggaraan ekosistem Smart City	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya aplikasi dan infrastruktur untuk pemerintahan maupun publik guna mewujudkan smart city	3.kali	700.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 5	1 3	Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagi pakai	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terkoneksinya aplikasi-aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan aplikasi berbagi pakai	5.aplikasi	600.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 5	1 4	Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terwujudnya tata kelola domain dan sub domain pemerintah daerah yang aman dan handal - Pelatihan interoperabilitas dan interkoneksi	100 orang	600.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 5	1 5	Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terintegrasinya data dan infrastruktur komunikasi	12.bulan	5.500.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 6		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan		Prosentase SDM yang meningkat kompetensinya	100.%	579.100.000	Dinas Komunikasi, dan

				informasi					Informatika
2	1 0	1 6	4	Asistensi/bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	fasilitasi peningkatan aparatur pemerintah daerah dalam bidang jurnalistik	100 peserta	47.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 6	5	Asistensi/bimbingan teknis bidang analisis data	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	100 peserta	50.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 6	1 1	Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	100 peserta	482.100.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 7		Program kerjasama informasi dengan mas media		prosentase informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipublikasi kan melalui media massa	100 %	1.112.200.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 7	1	Penyebarnya informasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media	5. kegiatan	617.200.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 7	2	Penyebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah tersebarnya informasi pemerintahan daerah melalui penerbitan majalah, tabloid, koran dan terlaksananya pelayanan multimedia	2.kegiatan	425.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 7	3	Penyebarnya informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terlaksananya desiminasi informasi	1.kegiatan	70.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 8		Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan infromasi daerah		Cakupan IKM yang dibina	14.kecamatan	877.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	1 0	1 8	5	Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui media center daerah	12.bulan	225.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 8	1 0	Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dalam 1 tahun	12. bulan	142.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 8	1 1	Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat	5.kegiata n	510.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 9		Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika		presentase SKPD yang telah memiliki website	100.%	2.937.000. 000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 9	5	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster,leaflet dan baleho	4.Jenis	325.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 9	7	Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terdokumentasi nya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	400. kali	700.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 9	8	Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial)	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat	25.kali	1.075.000.00 0	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 9	9	Komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televise	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terfasilitasinya komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	3.kegiata n	247.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	1 0	1 9	1 2	Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	penyusunan data informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sangketa informasi penyediaan informasi publik	4. Jenis	290.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 0	1 9	1 4	Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terlaksananya program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	4.kegiatan	300.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 4			Statistik				725.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 4	1 5		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		persentase ketersediaan dokumen statistik daerah	100.%	725.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 4	1 5	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	persentase ketersediaan dokumen statistik daerah	100.%	350.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 4	1 5	5	Pengelolaan Data Statistik Daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dok kab pemalang dalam angka,jumlah dok kec dalam angka,jumlah dok PDRB kec,jumlah dok indeks harga konsumen dan laju inflasi kab pemalang,jumlah dok indikator penting pembangunan kab pemalang	12 dokumen	375.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 5			Persandian				650.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 5	1 5		Program pengembangan data/informasi persandian		terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi	100.%	650.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	1 5	1 5	1	Pengamanan komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi	12. bulan	300.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	1 5	1 5	2	Penyelenggaraan kemananan informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi	12.bulan	350.000.000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor yang Tersedia	12. bulan	50,000,000	50,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy yang dibutuhkan dinas	6. Jenis	36,000,000	36,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	presentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	8. Jenis	24,000,000	24,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1. unit 4. unit 1. unit 1.pak	27,600,000	0	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12. bulan	13,200,000	13,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman yang dibutuhkan	9. bulan	79,200,000	79,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	1	18	Rapat-rapat koordinasi	Dinas Komunikasi,	Jumlah rapat koordinasi		204,000,000	204,000,000	Dinas Komunikasi,

				dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	dan Informatika	dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah				dan Informatika
2	10	1	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jasa keamanan kantor yang tersedia	3. Jenis	6,000,000	6,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	12 bulan	1,735,800,000	1,749,125,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang terpenuhi	7. unit	850,000,000	850,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang Tersedia	1. paket	25,000,000	25,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	10	Pengadaan mebeleur	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terpenuhinya kebutuhan Meubeler	1. Jenis	30,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah komputer dan perlengkapan yang Tersedia	1. unit	25,800,000	25,800,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	12	Pengadaan alat-alat elektronik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah alat-alat elektronik yang diadakan	1.paket	310,000,000	310,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah komputer dan perlengkapan yang Tersedia	1. unit	90,000,000	90,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9. unit	60,000,000	60,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor	12. bulan	60,000,000	60,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah Mebeleur yang Terpelihara	2.Jenis	40,000,000	40,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara	10. unit	30,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	2	31	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah alat-alat elektronik yang terpelihara	6.unit	25,000,000	25,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	2	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor	1.paket	190,000,000	203,325,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase meningkatnya kapasitas Sumber daya Aparatur	80.%	230,400,000	230,400,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	44.orang	48,000,000	48,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah aparatur pemerintah yang mengikutibintek	30 orang	182,400,000	182,400,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	10.dokumen	70,800,000	100,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah laporan capaian kinerja	4 dokumen	18,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dinas Komunikasi, dan Informatika	- Jumlah laporan keuangan bulanan yang tersusun tepat waktu	1.dokumen	14,400,000	15,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	6	4	penyusunan pelaporan	Dinas Komunikasi,			14,400,000	15,000,000	Dinas Komunikasi,

				keuangan akhir tahun	dan Informatika					dan Informatika
2	10	6	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan	4. dokumen	24,000,000	40,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		- Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan Benar	4.dokumen	82,200,000	216,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	9	1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dokumen database perencanaan SKPD yang tersusun	2.dokumen	58,200,000	170,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang Disusun	2.dokumen	24,000,000	46,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		tersedianya data center cakupan layanan BTS jumlah radio siaran/pengawasan isi siaran radio	100. % 95.% 12 perusahaan	10,993,070,000	10,993,070,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	5	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya peralatan studio dan komunikasi	3.unit	84,000,000	84,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya data base sistem informasi	4.dokumen	895,200,000	895,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	8	Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi	3. paket	66,510,000	66,510,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	9	Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan Informatika	4.paket	800,000,000	800,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	10	Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan Informatika	1.paket	1,182,000,000	1,182,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	15	12	Penyelenggaraan ekosistem Smart City	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya aplikasi dan infrastruktur untuk pemerintahan maupun publik guna mewujudkan smart city	3.lokasi kegiatan	1,560,000,000	1,560,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	15	13	Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagi pakai	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terkoneksinya aplikasi- aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan aplikasi berbagi pakai	7. aplikasi	878,400,000	878,400,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	14	Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terwujudnya tata kelola domain dan sub domain pemerintah daerah yang aman dan handal - Pelatihan interoperabilitas dan interkoneksi	1.kegiatan	986,160,000	986,160,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	15	15	Pengelolaan infrastruktur e-goverment, data dan informasi terintegrasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Terintegrasinya data dan infrastruktur komunikasi	20 OPD	4,180,800,000	4,180,800,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	16		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		- Prosentase formasi ASN yang terpenuhi presentase SKPD yang telah memiliki website	80.% 80. %	165,900,000	165,900,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	16	4	Asistensi/bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik	Dinas Komunikasi, dan Informatika	fasilitasi peningkatan aparatur pemerintah daerah dalam bidang jurnalistik	100.orang	51,900,000	51,900,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	16	5	Asistensi/bimbingan teknis bidang analisis data	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah pegawai ASN yang mengikuti bintek/pelatihan jumlah aparatur pemerintah yang mengikutibintek	50.orang 50 orang	30,000,000	30,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	16	11	Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	100.orang	84,000,000	84,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	17		Program kerjasama informasi dengan mas Media		terlaksananya desiminasi informasi		1,192,152,000	1,192,152,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	10	17	1	Penyebarluasan informasi pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media		761,196,000	761,196,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	17	2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah tersebarnya informasi pemerintahan daerah melalui penerbitan majalah, tabloid, koran dan terlaksananya pelayanan multimedia	3000. eksemplar	346,956,000	346,956,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	17	3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terlaksananya desiminasi informasi	4.kali	84,000,000	84,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	18		Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah		Cakupan IKM yang dibina	14.kelompok	304,134,000	304,134,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	18	5	Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui media center daerah	625. dokumen	127,614,000	127,614,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	18	10	Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang	12. bulan	116,520,000	116,520,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

						ditindaklanjuti/ditangani				
2	10	18	11	Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi Public	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah Rapat Koordinasi Penataan Ruang yang dilaksanakan	1.kegiatan	60,000,000	60,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19		Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika		presentase SKPD yang telah memiliki website	80.%	3,432,964,000	3,432,964,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
						presentase SKPD yang telah memiliki website	80.%			
						presentase SKPD yang telah memiliki website	80. %			

2	10	19	5	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll	Dinas Komunikasi, dan Informatika	jumlah pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet dan baleho		366,624,000	366,624,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	7	Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terdokumentasi nya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	360.kegiatan	795,900,000	795,900,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	8	Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial)	Dinas Komunikasi, dan Informatika Dinas Komunikasi, dan Informatika	Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat		1,234,680,000	1,234,680,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	9	Komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terfasilitasinnya komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televise terfasilitasinnya komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televise	5.kegiatan 24.kegiatan	419,760,000	419,760,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	10	19	12	Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	penyusunan data informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sangketa informasi penyediaan informasi public	2.kegiatan	216,000,000	216,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

						penyusunan data informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sangketa informasi penyediaan informasi public				
2	10	19	14	Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terlaksananya program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	120.kegiatan	400,000,000	400,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	14			Statistik				619,412,400	619,412,400	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	14	15		Program pengembangan data/informasi/statistik Daerah		dokumen data yang tersedia	1. dokumen	619,412,400	619,412,400	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	14	15	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Berkembangnya data/informasi/statistik daerah	12.bulan	529,412,400	529,412,400	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	14	15	5	Pengelolaan Data Statistik Daerah	Dinas Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dok kab pemalang dalam angka, jumlah dok kec dalam angka, jumlah dok PDRB kec, jumlah dok indeks harga konsumen dan laju inflasi kab pemalang, jumlah dok indikator penting pembangunan kab pemalang	12.bulan	90,000,000	90,000,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	15			Persandian				370,587,600	370,587,600	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2	15	15		Program pengembangan data/informasi persandian		presentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	100.%	370,587,600	370,587,600	Dinas Komunikasi, dan Informatika
						presentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar	100. %			

						PD				
						presentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD				
2	15	15	1	Pengamanan komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi		148,200,000	148,200,000	Dinas Komunikasi, dan Informatika

2	15	15	2	Penyelenggaraan keamanan informasi	Dinas Komunikasi, dan Informatika	terselenggaranya pelayanan publik yang aman handal, percaya dan bertanggungjawab		222,387,600	222,387,600	Dinas Komunikasi, dan Informatika
---	----	----	---	------------------------------------	-----------------------------------	--	--	-------------	-------------	-----------------------------------

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2021 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2020. Renja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai.

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tiga urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Urusan Komunikasi dan Informatika diprioritaskan pada penyediaan layanan komunikasi dan informasi publik, layanan infrastruktur komunikasi, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Urusan statistik diprioritaskan untuk penyediaan layanan satu data, dan Urusan Persandian diprioritaskan untuk layanan keamanan informasi.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi, prioritas, dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah pada tahun anggaran bersangkutan.

Pemalang, Agustus 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG**



Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610821 198903 1 003

LAMPIRAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah, pada Tahun 2021 Program dan Kegiatan menggunakan nomenklatur yang sesuai dengan Permendagri tersebut. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemetaan (mapping) Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Permendagri no 90 Tahun 2019 tersebut.

Adapun hasil mapping sebagai berikut:

MAPPING NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RPJMD DAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RPJMD 2016-2021					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
NO	PROGAM	KEGIATAN	INDIKATOR/ AKTIVITAS KEGIATAN	KODE REKENI NG	SUB KEGIATAN	Indikator Sub Kegiatan	KEGIATA N	PROGRAM	KODE REKENIN G	KETERANG AN
URUSAN PENUNJANG										
1	Progam pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Terdistribusikannya surat keluar dan masuk	2.10. 2.10.01.01 .01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terdistribusikannya surat keluar dan masuk	Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16. 2.16.01.2.03. 01	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik kantor	2.10. 2.10.01.01 .01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik kantor			2.16. 2.16.01.2.03. 02	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan kelengkapan Kantor yang tersedia	2.10. 2.10.01.01 .01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan kelengkapan Kantor yang tersedia			2.16. 2.16.01.2.03. 03	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perijinannya	2.10. 2.10.01.01 .01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perijinannya			2.16. 2.16.01.2.03. 06	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	2.10. 2.10.01.01 .01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun			2.16. 2.16.01.2.03. 07	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung yang terpelihara kebersihannya	2.10. 2.10.01.01 .01.08	penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung yang terpelihara kebersihannya			2.16. 2.16.01.2.03. 08	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah persediaan ATK selama 1 tahun	2.10. 2.10.01.01 .01.10	penyediaan alat tulis kantor	Jumlah persediaan ATK selama 1 tahun			2.16. 2.16.01.2.03. 10	

		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak; jumlah penggandaan	2.10.2.10.01.01	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak; jumlah penggandaan			2.16.2.16.01.2.03.11	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara instalasi listrik/penerangannya	2.10.2.10.01.01.01.12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara instalasi listrik/penerangannya			2.16.2.16.01.2.03.12	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia			2.16.2.16.01.2.03.13	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2.10.2.10.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia			2.16.2.16.01.2.03.15	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman beserta pendukungnya yang tersedia	2.10.2.10.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman beserta pendukungnya yang tersedia			2.16.2.16.01.2.03.17	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	2.10.2.10.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan			2.16.2.16.01.2.03.18	
		Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah gedung yang terjaga keamanannya	2.10.2.10.01.01.01.19	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah gedung yang terjaga keamanannya			2.16.2.16.01.2.03.14	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	2.10.2.10.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan			2.16.2.16.01.2.03.20	

		Pengadaan perlengkapan gedung kantor		2.10. 2.10.01.01 .02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				2.16. 2.16.01.2.03. 22	
		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	2.10. 2.10.01.01 .02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan			2.16. 2.16.01.2.03. 25	
		Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang disediakan	2.10. 2.10.01.01 .02.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang disediakan			2.16.01.2.16. 01.02.13	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2.10. 2.10.01.01 .02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			2.16. 2.16.01.2.03. 28	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2.10. 2.10.01.01 .02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			2.16. 2.16.01.2.03. 30	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2.10. 2.10.01.01 .02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			2.16. 2.16.01.2.03. 34	
		Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara	2.10. 2.10.01.01 .02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara			2.16. 2.16.01.2.03. 35	
		Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara	2.10. 2.10.01.01 .02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara			2.16. 2.16.01.2.03. 34	
		pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik dan perlengkapannya yang dipelihara	2.10. 2.10.01.01 .02.31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah alat-alat elektronik dan perlengkapannya yang dipelihara			2.16. 2.16.01.2.03. 34	

		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor pemerintahan yang direhabilitasi	2.10.2.10.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor pemerintahan yang direhabilitasi			2.16.2.16.01.2.03.38	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti pelatihan pelaksanaan tupoksi SKPD	2.10.2.10.01.01.05	bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan/bintek peraturan perundang-undangan	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur		2.16.2.16.01.2.04.11	
		sosialisasi peraturan perundang-undangan		2.10.2.10.01.01.05.02	sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi			2.16.2.16.01.2.04.10	
		bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		2.10.2.10.01.01.05.03	bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti pelatihan pelaksanaan tupoksi SKPD			2.16.2.16.01.2.04.11	
4	Program peningkatan pengembangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1. Tersusunnya LKJIP	2.10.2.10.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1. Tersusunnya LKJIP	Administrasi keuangan		2.16.2.16.01.2.02	
			2. Tersusunnya LPPD			2. Tersusunnya LPPD				
			3. Tersusunnya LKPJ			3. Tersusunnya LKPJ				
			4. Tersusunnya SAKIP			4. Tersusunnya SAKIP				
		penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	2.10.2.10.01.01.06.02	penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Administrasi Keuangan		2.16.2.16.01.2.02.07	
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	2.10.2.10.01.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Administrasi Keuangan		2.16.2.16.01.2.02.09	

		monitoring ,evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya dokumen monev	2.10.2.10.01.01.06.09	evaluasi kinerja perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		2.16.2.16.01.2.01.05	
					Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan		2.10.2.10.01.2.02.01	
5	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	penyusunan database perencanaan SKPD	Tersusunnya RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah	2.10.2.10.01.01.09.01	Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah	Tersusunnya RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah	perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		2.16.2.16.01.2.01.01	
		penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah	2.10.2.10.01.01.09.02		Tersusunnya dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah	Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan		2.16.2.16.01.2.01.02	

URUSAN PERSANDIAN

6	Program pengembangan data/informasi persandian	pengamanan komunikasi dan informasi	pengamanan semua situs yang berdomain .pemalangkab.go.id	2.15.2.10.01.01.15.01	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah server pemkab pemalang yang diamankan menggunakan SSL	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	2.21.02.2.01.03	pengamanan jaringan, server SSL (Secure Socket Layer) adalah lapisan keamanan untuk melindungi transaksi di website Anda dengan teknologi enkripsi data yang canggih. ... Mengamankan transaksi yang ada di website
----------	---	-------------------------------------	--	-----------------------	--	--	---	--	-----------------	---

										dengan enkripsi termasuk data kartu kredit, password, dll.
		penyelenggaraa n keamanan informasi	Layanan Sertifikat Elektronik	2.15. 2.10.01.01.1 5.02	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(jumlah fasilitasi sertifikasi tanda tangan elektronik)	Penyelengga raan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Program penyelenggar aan persandian untuk pengamanan informasi	2. 21. 02. 2. 01. 04	
STATISTIK										
7	Program pengembang an data/informas i/ statistik Daerah	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Statistik sektoral : - Pemalang Dalam Angka - Kecamatan Dalam Angka - Nilai Tukar Petani	2.14. 2.10.01.01.1 5.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektor	Jumlah koordinasi pengumpulan data statistik sektoral	Penyeleng araan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENYELEN GGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2. 20 . 02. 2. 01. 01	
		Pengelolaan Data Statistik Daerah	(Pengelolaan metadata)	2.14. 2.10.01.01.1 5.05	(Membangun Metadata Statistik Sektoral)	jumlah metadata yang tersusun	Penyeleng araan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENYELEN GGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2. 20. 02. 2. 01. 03	

			(rapat koordinasi statistik sektoral)		(Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral)	menjadi belanja digabung di Jumlah koordinasi pengumpulan data statistik sektoral			2. 20. 02. 2. 01. 01	
			(cetak buku statistik sektoral)		(Membangun Metadata Statistik Sektoral)	gabung menjadi belanja di jumlah metadata yang tersusun			2. 20. 02. 2. 01. 03	
	Program Fasilitasi Peningkatan SDMBidang Komunikasi dan Informasi	Bimbingan Teknis Bidang Analisis data	(jumlah PNS yang dibintek)	2.10.2.10.01.16.05	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah peserta Bintek Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2. 20. 02. 2. 01. 02	

URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA SUB URUSAN APLIKASI INFORMATIKA

8	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Pengadaan alat studio dan komunikasi	(pengadaan kamera, tv, peralatan video conference)	2.10.2.10.01.01.15.05	(Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah)	(pengadaan kamera, tv, peralatan video conference) (diarahkan menjadi belanja)	Pengelolaan E-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2. 16. 03. 2. 02. 10	
		pengkajian dan pengembangan sistem informasi	(jumlah sosialisasi regulasi TIK yang diselenggarakan)	2.10.2.10.01.01.15.06	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah sosialisasi regulasi TIK yang dilaksanakan	Pengelolaan E-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		2. 16. 03. 2. 02. 10	
			(jumlah kegiatan pesantren TIK yang diselenggarakan)			diarahkan menjadi belanja di jumlah sosialisasi regulasi TIK yang				

						dilaksanakan				
		pemeliharaan alat studio dan komunikasi		2.10.2.10.01.01.1 5.08	(Pengelolaan Media Komunikasi Publik)	(diarahkan menjadi belanja di jumlah program radio yang dikelola)			2.16.02.2.01.05	
		pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	pembangunan area hotspot	2.10.2.10.01.01.1 5.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah area hotspot yang dibangun	Penyelenggaraan sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		2.16.03.2.02.09	
			sosialisasi dan pelatihan desain grafis kpd komunitas		Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	jumlah peserta sosialisasi undang-undang ITE kpd komunitas			2.16.02.2.01.12	komunitas motor,dll
		pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi	(jumlah server dan genset yang terpelihara)	2.10.2.10.01.01.1 5.10	Penyelenggaraan sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah server dan genset yg terpelihara	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		2.16.03.2.01.03	

		Penyelenggaraan Ekosistem Smart City	Terselenggaranya Evaluasi Smart City	2.10.2.10.01.01.15.12	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah Kegiatan Capacity Building yang dilaksanakan	Pengelolaan E-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		2.16.03.2.02.09	
		Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagai (berbagi) pakai	(Jumlah Aplikasi yang dikembangkan)	2.10.2.10.01.01.15.13	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi yang diinteroperabilaskan (integrasi)			2.16.03.2.02.07	
		pengelolaan nama domain dan sub domain daerah	ekspo TIK	2.10.2.10.01.01.15.14	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah ekspo TIK yang dilaksanakan			2.16.03.2.01.12	
			jumlahh aplikasi yg dibuat			(gabung dengan yg diatas)				
			pelatihan (Pelatihan) TIK			(gabung dengan yg diatas)				
		Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi	(fasilitasi bandwidth)	2.10.2.10.01.01.15.15	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e-government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	jumlah opd yang terfasilitasi bandwidth internet	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		2.16.03.2.01.02	
			(jumlah jaringan yang terintegrasi)			(jadi belanja diatas)				

URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

9	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi	asistensi / Bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik	(jumlah peserta Bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik)	2.10.2.10.01.01.16.04	penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	jumlah peserta Bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik (peserta umum)	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik pemerintahan daerah	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02.2.01.10	
					penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	jumlah petugas PIC yg dibintek (jumlah PIC yang mengikuti bintek)				
		Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang	(jumlah peserta Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang)	2.10.2.10.01.01.16.11	penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	(gabungan dengan bintek jurnalistik)			2.16.02.2.01.10	
10	Program kerjasama informasi dengan mas media	penyebarluasan informasi pembangunan daerah		2.10.2.10.01.01.17.01	Layanan Hubungan Media	jumlah pers release yang disebarluaskan			2.16.02.2.01.07	
		penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		2.10.2.10.01.01.17.02	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah edisi majalah yang diterbitkan			2.16.02.2.01.05	
		Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat		2.10.2.10.01.01.17.03	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah diseminasi informasi melalui media tradisional			2.16.02.2.01.05	

11	Program oenguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah	revitalisasi pendayagunaan media center daerah		2.10.2.10.01.01.18.05	pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	jumlah konten yang tersedia untuk medsos kab. Pematang			2.16.02.2.01.04	
					pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	(Jumlah konten kebijakan daerah melalui media luar ruang)				
					pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	jumlah kegiatan pemerintahan daerah yang didokumentasikan				
					(Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah)	(pengadaan kamera, tv, peralatan video conference) (diarahkan menjadi belanja)	Pengelolaan E-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		2.16.03.2.02.10	
		penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center		2.10.2.10.01.01.18.10	Monitoring opini dan Aspirasi Publik	jumlah pengaduan yang tertangani	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02.2.01.02	
					Monitoring opini dan Aspirasi Publik	jumlah monitoring pemberitaan media massa dan medsos	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02.2.01.02	

							ota			
		bintek PIC			penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	jumlah PIC yang mengikuti bintek	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2. 16. 02. 2. 01. 10	PIC singkatan dari Person In Charge yang artinya seseorang bertanggung jawab dalam menangani tugas tertentu di dalam kantor
		penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik		2.10.2.10.01.01.18.11	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	jumlah kemitraan komunitas yg terfasilitasi (Kelompok Informasi Masyarakat)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2. 16. 02. 2. 01. 12	
12	Program peningkatan tata laksana komunikasid dan informatika	pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster ,leaflet,baleho dll		2.10.2.10.01.01.19.05	pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	(Jumlah konten kebijakan daerah melalui media luar ruang)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2. 16. 02. 2. 01. 04	
		Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan SKPD		2.10.2.10.01.01.19.07	pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	jumlah kegiatan pemerintahan daerah yang didokumentasikan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2. 16. 02. 2. 01. 04	

		Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (advetorial)		2.10.2.10.01.01.19.08	layanan hubungan media	Jumlah informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (advetorial)			2.16.02.2.01.07	
		komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi		2.10.2.10.01.01.19.09	layanan hubungan media	jumlah komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi			2.16.02.2.01.07	
		pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah		2.10.2.10.01.01.19.12	Pelayanan Informasi Publik	jumlah informasi publik yang disediakan			2.16.02.2.01.06	
		penanganan sengketa informasi publik				jumlah sengketa informasi publik yang ditangani			2.16.02.2.01.06	
		permohonan informasi				jumlah pemohon informasi publik yang terlayani			2.16.02.2.01.06	
		pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat		2.10.2.10.01.01.19.14	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah program radio yang dikelola			2.16.02.2.01.05	
					(Pengelolaan Media Komunikasi Publik)	(diarahkan menjadi belanja di jumlah program radio yang dikelola)				

